

ABSTRAK

Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diberlakukan di Indonesia bertujuan untuk membantu pekerja dalam memperoleh hunian yang layak. Namun, kebijakan ini menuai berbagai kontroversi, terutama terkait dengan potensi pelanggaran hak-hak pekerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis implementasi Tapera dalam konteks perlindungan hak pekerja berdasarkan konstitusi, peraturan ketenagakerjaan, serta prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan gaji pekerja untuk iuran Tapera dapat dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan kebijakan yang berpotensi mengurangi hak pekerja atas penghasilan penuh sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan prinsip kesejahteraan pekerja.

Selain itu, mekanisme pengelolaan dana Tapera masih menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitasnya. Dengan demikian, kebijakan ini perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak bertentangan dengan hak-hak pekerja serta tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

Kata kunci: Pelanggaran Hak Pekerja, Tapera, Penelitian Normatif, Kesejahteraan, Kebijakan Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

The Public Housing Savings Policy (Tapera) implemented in Indonesia aims to help workers obtain adequate housing. However, this policy has generated various controversies, especially regarding potential violations of workers' rights. This research uses normative research methods with a statutory approach and a conceptual approach to analyze the implementation of Tapera in the context of protecting workers' rights based on the constitution, labor regulations and human rights principles. The research results show that cutting workers' salaries for Tapera contributions can be categorized as a form of policy coercion that has the potential to reduce workers' rights to full income as guaranteed in the Employment Law and the principles of worker welfare.

Apart from that, the Tapera fund management mechanism still raises questions regarding its transparency and accountability. Thus, this policy needs to be evaluated thoroughly so that it does not conflict with workers' rights and remains in line with the principles of social justice and worker welfare in Indonesia.

Keywords: Workers' Rights Violations, Tapera, Normative Research, Welfare, Employment Policy.